

**PENGARUH MOTIVASI, INTEGRITAS, DAN AKUNTABILITAS
TERHADAP KUALITAS AUDIT APARAT INSPEKTORAT DALAM
PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH**

**(Studi Empiris Pada Inspektorat Kota Padang, Padang Panjang, dan
Bukittinggi)**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai Salah Satu Persyaratan untuk Menyelesaikan Studi S1
pada Fakultas Ekonomi (FE) Universitas Negeri Padang*



OLEH

MUHAMMAD RIDHO

17785/2010

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2015

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

PENGARUH MOTIVASI, INTEGRITAS DAN AKUNTABILITAS
TERHADAP KUALITAS AUDIT APARAT INSPEKTORAT DALAM
PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH
(Studi Empiris pada Inspektorat Kota Padang, Padang Panjang dan
Bukittinggi)

Nama : Muhammad Ridho
TM/NIM : 2010/17785
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi

Padang, Agustus 2015

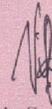
Disetujui oleh:

Pembimbing I



Charoline Cheisvianny, SE, M.Ak
NIP : 19801019 200604 2 002

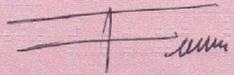
Pembimbing II



Vita Fitria Sari, SE, M.Si
NIP : 19870515 201012 2 009

Mengetahui,

Ketua Prodi Studi Akuntansi



Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak
NIP : 19730213 199903 1 003

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*

Judul : PENGARUH MOTIVASI, INTEGRITAS DAN AKUNTABILITAS TERHADAP KUALITAS AUDIT APARAT INSPEKTORAT DALAM PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH (Studi Empiris pada Inspektorat Kota Padang, Padang Panjang dan Bukittinggi)

Nama : Muhammad Ridho

TM/NIM : 2010/17785

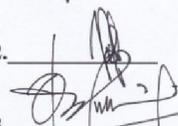
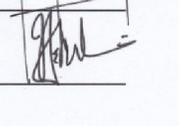
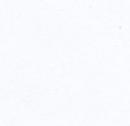
Program Studi : Akuntansi

Keahlian : Akuntansi Sektor Publik

Fakultas : Ekonomi

Padang, Agustus 2015

Tim Penguji

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	Charoline Cheisviyanny, SE, M.Ak	1. 
2. Sekretaris	Vita Fitria Sari, SE, M.Si	2. 
3. Anggota	Halmawati, SE, M.Si	3. 
4. Anggota	Herlina Helmy, SE, M.S, Ak	4. 

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ridho
TM/NIM : 2010/17785
Tempat/Tgl. Lahir : Bukittinggi /23 Desember 1991
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jl. Talang Betutu No. 16 Air Tawar Timur Padang
No. Hp/Telp. : 08975142071
Judul Skripsi : Pengaruh Motivasi, Integritas dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat (Studi Empiris pada Inspektorat Kota Padang, Kota Padang Panjang dan Kota Bukittinggi)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis/skripsi saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis/skripsi ini merupakan gagasan, rumusan dan penilaian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis/skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan mencantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini **Sah** apabila telah ditanda tangani **Asli** oleh tim pembimbing, tim penguji, dan Ketua Program Studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana yang diperoleh karena karya tulis saya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Padang, Agustus 2015

Yang menyatakan,



Muhammad Ridho
NIM: 17785

ABSTRAK

Muhammad Ridho. (17785/2010). Pengaruh Motivasi, Integritas dan Akuntabilitas terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Inspektorat Kota Padang, Kota Padang Panjang dan Kota Bukittinggi)

**Pembimbing : 1. Charolline Cheisviyanny SE, M.Ak
2. Vita Fitria Sari, SE, M.Si**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji 1) pengaruh motivasi terhadap kualitas audit aparat inspektorat 2) pengaruh integritas terhadap kualitas audit aparat inspektorat 3) pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas audit aparat inspektorat.

Penelitian ini tergolong penelitian kausatif. Populasi penelitian adalah Inspektorat di kota Padang, kota Padang Panjang dan kota Bukittinggi. Sampel ditentukan berdasarkan metode *total sampling*. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner, total kuesioner yang dapat diolah sebanyak 40 kuesioner. Jenis data adalah data subjek dan sumber data adalah data primer. Analisis data menggunakan regresi berganda dengan uji F dan uji t dengan bantuan *Statistical Package For Social Science* (SPSS)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) motivasi berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas audit aparat inspektorat dimana $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $3,578 > 2,02108$ dan Sig. $0,001 < 0,05$, yang berarti H_1 di terima. (2) integritas berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas audit aparat inspektorat dimana $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,813 > 2,02108$ dan Sig $0,038 < 0,05$, yang berarti H_2 diterima. (3) akuntabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas audit aparat inspektorat dimana $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $3,048 > 2,02108$ dan Sig $0,019 < 0,05$ yang berarti H_3 diterima.

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Berdasarkan hasil penelitian, dapat dilihat bahwa pengaruh yang diberikan tiga variabel bebas yaitu motivasi, integritas dan akuntabilitas terhadap kualitas audit aparat inspektorat baik. Sebaiknya aparat inspektorat meningkatkan indikator sehingga dapat meningkatkan kepercayaan terhadap hasil audit aparat inspektorat (2) Penelitian ini masih terbatas pada motivasi, integritas, dan akuntabilitas. Untuk penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi kualitas audit aparat inspektorat.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kemudahan pada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Motivasi, Integritas dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Inspektorat Kota Padang, Kota Padang Panjang dan Kota Bukittinggi)”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan program studi S-1 dan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, perkenalkan penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Charoline Cheisviyanny, SE, M.Ak selaku pembimbing I dan Ibu Vita Fitria Sari , SE, M.Si selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan transfer ilmu kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Ibu Halmawati, SE, M.Si dan Ibu Herlina Helmy, SE, M.S, Ak selaku penguji yang telah memberi banyak saran dan perbaikan dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Prof. Dr. Yunia Wardi, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

4. Bapak Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak dan Bapak Henri Agustin SE, M.Sc, Ak selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
5. Ibu Salma Taqwa, SE, M.Si selaku dosen Penasehat Akademik (PA).
6. Pegawai perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
7. Staf dosen serta karyawan/karyawati Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
8. Ayahanda dan Ibunda tercinta, kakak dan adik-adik tersayang serta keluarga besar yang telah memberikan perhatian, semangat, do'a, dorongan dan pengorbanan baik secara moril maupun materil hingga penulis dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini.
9. Untuk Adinda Suci Luthfia Ulfah, terima kasih atas semangat yang telah diberikan sampai penulis menyelesaikan studi dan menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman Prodi Akuntansi angkatan 2010 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang serta rekan-rekan Prodi Ekonomi Pembangunan, Manajemen, dan Pendidikan Ekonomi yang sama-sama berjuang atas motivasi, saran, serta dukungan yang sangat berguna dalam penulisan skripsi ini.
11. Para senior dan junior di se-lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang memberikan semangat belajar, do'a, dan motivasi penulis untuk berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Serta semua pihak yang telah membantu dalam proses perkuliahan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga bantuan, bimbingan dan petunjuk yang bapak/ibu dan rekan- rekan berikan menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Padang, 7 Agustus 2015

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
 BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, HIPOTESIS	
A. Kajian Teori	
1. Teori Harapan	13
2. Pengawasan Keuangan Daerah	14
3. Kualitas Audit	17
4. Motivasi.....	22
5. Integritas	21
6. Akuntabilitas.....	25
B. Penelitian Terdahulu	27
C. Hubungan Antar Variabel	28
D. Kerangka Konseptual	31
E. Hipotesis	31

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	33
B. Populasi dan Sampel	33
C. Responden	33
D. Jenis Data dan Sumber Data	34
E. Metode Pengumpulan Data	34
F. Pengukuran Variabel	35
G. Instrumen Penelitian.....	35
H. Teknik Analisis Data	
1. Analisis Regresi Berganda	37
2. Uji Koefisien Determinasi	38
3. Uji F (Simultan)	38
4. Uji t-Test (Hipotesis)	38
I. Uji Asumsi Klasik.....	45
1. Uji Normalitas.....	38
2. Uji Multikolinearitas.....	39
3. Uji Heterokedastisitas	39
J. Definisi Operasional.....	40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum.....	42
B. Demografi Responden	43
C. Deskripsi Hasil Penelitian	44
D. Statistik Deskriptif	51
E. Uji Validitas dan Uji Relabilitas	52
F. Uji Asumsi Klasik	
1. Uji Normalitas	54
2. Uji Heteroskedastisitas	55
3. Uji Multikolinearitas	56

G. Uji Model	
1. Uji F-Test	57
2. <i>R Square</i>	58
3. Analisis Regresi	59
H. Uji Hipotesis	60
I. Pembahasan	62
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	67
B. Keterbatasan Penelitian.....	67
C. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	69

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Daftar Nama dan Alamat Responden.....	34
2. Daftar Skor Jawaban Pernyataan Berdasarkan Sifat.....	35
3. Kisi-kisi Instrumen Penelitian.....	36
4. Penyebaran dan pengembalian kuisisioner.....	42
5. Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan	43
6. Responden Berdasarkan Lama Bekerja	44
7. Distribusi Frekuensi Variabel Motivasi	45
8. Distribusi Frekuensi Variabel Integritas	46
9. Distribusi Frekuensi Variabel Akuntabilitas	48
10. Distribusi Frekuensi Variabel Kualitas Audit	50
11. Statistik Deskriptif	52
12. Uji Validitas	53
13. Uji Reliabilitas	53
14. Uji Normalitas	55
15. Uji Heteroskedastisitas	56
16. Uji Multikolinearitas	57
17 Uji F test	58
18. <i>R Square</i>	58
19. Koefisien Regresi Berganda	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Konseptual.....	31

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Kuesioner Penelitian	72
2. Tabulasi Data Responden.....	78
3. Uji Validitas dan Reabilitas Data Penelitian	83
4. Uji Asumsi Klasik	87
5. Pengujian Model Penelitian	89

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Era demokrasi menuntut pemerintah untuk lebih transparan dalam pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh lembaga-lembaga sektor publik. Untuk itu, pengawasan yang tepat sangat diperlukan agar tujuan ekonomi pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat dapat tercapai. Seperti yang dinyatakan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/05/MPAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah bahwa pengawasan intern pemerintahan merupakan fungsi manajemen yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Salsabila dan Hepi (2011), melalui pengawasan intern dapat diketahui apakah suatu instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana, kebijakan yang telah ditetapkan, dan ketentuan.

Selanjutnya Efendy (2010) menjelaskan bahwa untuk mengetahui apakah pengelolaan keuangan daerah telah dilakukan dengan baik oleh aparat yang berwenang, maka perlu dilakukan pemeriksaan (audit) untuk memperoleh bukti-bukti yang memadai. Salah satu unit yang melakukan audit/pemeriksaan terhadap pemerintah daerah adalah inspektorat daerah. Inspektorat daerah mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah dan tugas lain yang diberikan kepala daerah, sehingga dalam tugasnya inspektorat sama dengan auditor internal (Falah, 2005).

Menurut Mardiasmo (2005), Audit internal adalah audit yang dilakukan oleh unit pemeriksa yang merupakan bagian dari organisasi yang diawasi. Selain itu, fungsi auditor internal adalah melaksanakan fungsi pemeriksaan internal yang merupakan suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilakukan. Selain itu, auditor internal diharapkan pula dapat lebih memberikan kontribusi bagi perbaikan efisiensi dan efektivitas dalam rangka peningkatan kinerja organisasi (Boynton, 2003: 8). Dengan demikian, dalam hal ini aparat inspektorat daerah memegang peranan yang sangat penting dalam proses terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan di daerah.

Peran dan fungsi Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota secara umum diatur dalam pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan, Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota mempunyai fungsi sebagai berikut: pertama, perencanaan program pengawasan; kedua, perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan; dan ketiga, pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.

Untuk meningkatkan kualitas audit khususnya yang dilakukan oleh aparat pengawas internal pemerintah (APIP) dalam hal ini inspektorat dapat menggunakan standar pemeriksaan keuangan negara (SPKN) yang tertuang dalam Peraturan BPK-RI No. 01 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Pernyataan standar umum SPKN yang pertama menyatakan

bahwa pemeriksa secara kolektif harus memiliki kecakapan profesional yang memadai untuk melaksanakan tugas pemeriksaan, hal ini menunjukkan, dalam meningkatkan kualitas audit, organisasi pemeriksa diharuskan memiliki perekrutan yang baik, pengembangan yang berkelanjutan, dan evaluasi atas pemeriksa untuk membantu organisasi pemeriksa dalam mempertahankan pemeriksa yang memiliki kompetensi yang memadai.

Government Accountability Office (GAO) mendefinisikan kualitas audit sebagai ketaatan terhadap standar profesi dan ikatan kontrak selama melaksanakan audit (Lowenshon, et al, 2005). Bagi auditor, kualitas hasil kerja atau kinerja dapat dinilai dari kualitas audit yang dihasilkan. Dalam pelaksanaan audit, auditor harus menjalankan aspek-aspek esensial dari audit itu sendiri yaitu, Proses sistematis audit, evaluasi bukti-bukti, asersi, objektivitas, menilai derajat hubungan yang ada, dan mengkomunikasikan hasil audit. (Bastian, 2010) Oleh karena itu dengan melaksanakan aspek-aspek esensial tersebut, auditor diharapkan dapat mewujudkan kualitas audit yang berkualitas.

Dalam melaksanakan audit, auditor juga dituntut harus memiliki keahlian dan pelatihan yang cukup sebagai auditor. Auditor harus memiliki pengetahuan mengenai metode dan teknik audit serta segala hal yang menyangkut pemerintahan seperti organisasi, fungsi, program dan kegiatan pemerintahan (BPKP, 1998). Keahlian auditor dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan serta pengalaman yang memadai dalam melaksanakan audit (Tampubolon, 2005).

Selain keahlian audit, seorang auditor juga harus memiliki motivasi dalam melakukan audit agar auditor mempunyai daya penggerak dari dalam individu atau auditor untuk melakukan aktivitas-aktivitas audit yang sesuai dengan peraturan yang berlaku (Pusdiklatwas BPKP, 2008). Motivasi dipandang dari segi proses, berarti motivasi dapat dirangsang oleh faktor luar, untuk menumbuhkan motivasi dalam diri yang melalui proses rangsangan sehingga dapat mencapai tujuan yang dikehendaki. Motivasi dipandang dari segi tujuan, berarti motivasi merupakan sasaran stimulus yang akan dicapai. Jika seorang mempunyai keinginan untuk belajar suatu hal, maka dia akan termotivasi untuk mencapainya.

Menurut Goleman (2001), bahwa dengan adanya motivasi seseorang akan memiliki semangat juang yang tinggi untuk meraih tujuan dan memenuhi standar yang ada atau dengan kata lain, motivasi akan mendorong seseorang termasuk auditor, untuk berprestasi dan berkomitmen terhadap kelompok serta memiliki inisiatif dan optimisme yang tinggi. Motivasi ini juga dapat didefinisikan sebagai keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu dengan adanya motivasi yang tinggi, auditor akan terdorong untuk melakukan tugas sebaik-baiknya sehingga hasil audit akan lebih berkualitas (Reksohadiprodjo, 1990 dalam Ardini, 2010).

Selain motivasi, kualitas audit juga dapat dipengaruhi oleh sikap integritas dari auditor. Menurut Mulyadi (2002) menjelaskan bahwa integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan bagi anggota dalam menguji semua keputusan yang diambilnya. Integritas seorang auditor

sangat diperlukan agar auditor dapat bertindak jujur dan tegas dalam melaksanakan audit. Dalam hal ini prinsip yang mengharuskan auditor memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur kejujuran, bijaksana, dan bertanggung jawab untuk membangun kepercayaan guna memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang andal (Pusdiklatwas BPKP, 2008). Auditor diharapkan untuk senantiasa menjaga kejujuran dalam melaksanakan tugas profesionalnya agar hasil audit yang dilaporkan berkualitas dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Menurut Wibowo (2006), integritas menguatkan kepercayaan dan karenanya menjadi dasar bagi pengendalian keputusan mereka. Auditor sektor publik juga dituntut untuk berani agar dapat membentengi diri dari tekanan-tekanan yang dilakukan *auditee*.

Selanjutnya, sikap bijaksana dan bekerja penuh tanggungjawab dengan mengutamakan pada bukti audit yang cukup dan kompeten dalam pengungkapan hasil laporan audit juga merupakan bagian dari integritas yang harus dimiliki oleh seorang auditor. Mabruri dan Winarna (2010) menyatakan bahwa kualitas audit dapat dicapai jika auditor memiliki integritas yang baik. Integritas yang tinggi akan membuat auditor bekerja dengan lebih jujur dan bijaksana sehingga hasil audit yang dilaporkan lebih dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipercaya oleh masyarakat.

Faktor terakhir yang mempengaruhi kualitas hasil audit yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan tanggung jawab profesi yaitu selama menjalankan tugas, seseorang harus senantiasa melakukan pekerjaan dengan penuh rasa tanggung jawab serta wajib menjalankan kemahiran jabatannya dengan seksama, sehingga akan diperoleh hasil kerja yang

memuaskan. Dalam sektor publik akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Stanbury, 2003 dalam Mardiasmo, 2006).

Maka, dengan adanya akuntabilitas, auditor diharapkan dapat bekerja dengan lebih bertanggungjawab sehingga hasil audit lebih berkualitas dan dapat dipercaya.

Berdasarkan pemeriksaan laporan keuangan tahun 2012, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP DPP) atas laporan keuangan pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2012. Meskipun hasil pemeriksaan laporan keuangan (LK) pemerintah Kota Padang Panjang menghasilkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP DPP), kualitas audit yang dilakukan oleh auditor aparat inspektorat masih menjadi perhatian masyarakat. Hal ini disebabkan karena terdapat temuan BPK yang tidak ditemukan oleh inspektorat sebagai auditor internal seperti penyajian aset tetap peralatan dan mesin tidak termasuk yang berasal dari hibah pemerintah pusat APBN, BOS, dan lainnya yang relatif kurang baik.

Selanjutnya, Pada Tahun 2013, BPK juga menyorot perjalanan dinas satuan perangkat kerja daerah (SKPD) di Pemko Padang. Hasil uji petik atas bukti pertanggung jawaban belanja perjalanan dinas luar pada luar daerah pada 20

SKPD menunjukkan ketidaksesuaian bukti pertanggungjawaban transportasi dengan menggunakan maskapai Garuda Indonesia. Ketidaksesuaian tersebut berupa harga tiket yang tidak sama dengan berdasarkan konfirmasi kepada maskapai penerbangan. Pertama, selisih harga tiket Rp119,679 juta disebabkan pegawai yang melakukan perjalanan dinas menaikkan harga tiket (mark up) yang dilampirkan dalam surat pertanggungjawaban.

Kedua, selisih harga tiket Rp13,569 juta disebabkan biro perjalanan menaikkan harga tiket dari harga yang seharusnya tanpa sepengetahuan pembeli tiket. Menurut Badan Pemeriksa Keuangan, kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu pasal 61 ayat 1 menyatakan setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh dari pihak penagih. Selain itu, bertentangan juga dengan Permendagri Nomor: 21/2011 tentang perubahan Permendagri Nomor: 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Kondisi tersebut mengakibatkan belanja perjalanan dinas minimal Rp139,780 juta diragukan kebenarannya dan berindikasi merugikan Negara (<http://hariansinggalang.co.id/bpk-temukan-ketidakwajaran-di-pemko-padang/>).

Inspektorat Kota dalam hal ini dituntut untuk lebih meningkatkan pengawasan pada pengalokasian belanja perjalanan dinas tersebut.

Selanjutnya, Belanja untuk pegawai dan honorarium Pemko Bukittinggi tahun 2014 dianggarkan Rp. 324 miliar lebih atau 63 persen dari total belanja daerah. Sementara itu, belanja modal yang bersentuhan dengan publik dialokasikan sebesar Rp46 miliar atau 9,03 persen. Kecilnya alokasi belanja

modal ini jauh dari yang ditentukan Peraturan Presiden No. 5/2010 tentang RPJMN 2010-2014 yang mengamankan belanja modal sekurang-kurangnya 30 persen dari belanja daerah (<http://hariansinggalang.co.id/belanja-pegawai-lebih-besar-dari-belanja-publik/>).

Berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan di atas dapat dikatakan bahwa aparat inspektorat telah melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun pada pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK, masih ditemukan beberapa kesalahan-kesalahan dalam pengelolaan keuangan daerah yang tidak ditemukan oleh aparat inspektorat. Dengan adanya kasus tersebut, maka aparat inspektorat perlu mengidentifikasi permasalahan yang akan mempengaruhi kualitas audit dan meningkatkan motivasi, integritas, dan akuntabilitas, dimana dengan adanya motivasi aparat inspektorat memiliki semangat juang yang tinggi untuk mencapai tujuannya yaitu memperoleh kualitas pemeriksaan yang baik dan memadai, selain itu dengan memiliki sikap integritas dari aparat inspektorat dapat menjamin apakah pemeriksaan telah dilakukan dengan independen serta sikap akuntabilitas yang dimiliki dari aparat inspektorat yang menggambarkan tanggung jawab terhadap audit yang telah dilakukan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Berikut ini adalah hasil beberapa penelitian sebelumnya telah melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kualitas audit aparat signifikan terhadap kualitas audit aparat Inspektorat. Penelitian yang dilakukan oleh Ramadhanis (2012) yang menyatakan bahwa motivasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit aparat inspektorat. Hasil tersebut juga konsisten

dengan penelitian yang dilakukan Wirasuasti (2014) yang menyatakan bahwa motivasi berpengaruh positif terhadap kualitas audit aparat inspektorat, namun pada penelitian yang dilakukan oleh Ardini (2010), motivasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil audit aparat inspektorat.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Salsabila dan Hepi (2011) menemukan bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit aparat Inspektorat. Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardini (2010) yang menemukan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas audit aparat inspektorat, sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Istahayu (2010), yang menyatakan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit aparat inspektorat,

Penelitian yang dilakukan oleh Badjuri (2012) menemukan bahwa integritas berpengaruh positif terhadap kualitas audit aparat inpektorat. Hal ini juga konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Rohman (2012) yang menyatakan bahwa integritas mempunyai pengaruh signifikan terhadap kualitas audit aparat inspektorat, namun pada penelitian yang dilakukan oleh Sukriah *et al*(2009) yang menyatakan bahwa integritas tidak berpengaruh positif terhadap kualitas audit aparat inspektorat.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah peneliti ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Efendy (2012), yang membahas kompetensi, indepedensi, dan motivasi berpengaruh terhadap kualitas audit aparat inspektorat, namun pada penelitian ini peneliti mengganti variabel kompetensi dan indepedensi dengan Integritas dan Akuntabilitas sebagai variabel independen.

Alasan pemilihan variabel integritas dan akuntabilitas karena dalam menjalankan tugasnya seorang auditor harus memiliki sikap jujur dan bertanggung jawab agar dapat mendapatkan hasil audit yang berkualitas. Selanjutnya, variabel motivasi dipilih karena motivasi merupakan hal yang dapat mendorong auditor dalam mencapai tujuannya, dalam hal ini kualitas audit inspektorat.

Untuk instrumen penelitian, peneliti memilih sumber-sumber yang berbeda dari penelitian sebelumnya, seperti variabel kualitas audit yang mengacu pada penelitian Efendy (2012), begitu juga dengan variabel motivasi yang diadopsi dari penelitian Efendy (2012), kemudian, variabel integritas, peneliti menggunakan indikator yang ada pada penelitian yang dilakukan oleh Badjuri (2012), dan untuk variabel akuntabilitas, menggunakan indikator yang dijelaskan dalam penelitian Mardisar dan Sari (2007).

Selanjutnya, Penelitian sebelumnya juga dilakukan di tempat yang berbeda yaitu, Buleleng, Bali, DKI Jakarta, serta Gorontalo, sedangkan penelitian ini dilakukan pada 3 daerah yaitu, Inspektorat Kota Padang Panjang, Kota Padang, dan Kota Bukittinggi, di Provinsi Sumatera Barat. Objek Penelitian ini dilakukan di Inspektorat Kota, karena auditor inspektorat bertugas memberikan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan, tentunya yang berkaitan dengan pengawasan keuangan daerah.

Berdasarkan uraian-uraian dan permasalahan yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul

“ Pengaruh Motivasi, Integritas dan Akuntabilitas terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah ”.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah :

1. Sejauhmana motivasi berpengaruh terhadap kualitas hasil audit aparat inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah ?
2. Sejauhmana Integritas berpengaruh terhadap kualitas hasil audit aparat inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah ?
3. Sejauhmana akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas hasil audit aparat inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji:

1. Pengaruh motivasi terhadap kualitas hasil audit aparat inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah.
2. Pengaruh integritas terhadap kualitas hasil audit aparat inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah.
3. Pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas hasil audit aparat inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah.

D. MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepadabeberapa pihak diantaranya:

1. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pelatihan intelektual dan menambah pemahaman peneliti mengenai pengaruh motivasi, integritas dan akuntabilitas terhadap kualitas audit aparat inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah.
2. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat melengkapi studi empiris sebelumnya dan menambah referensi bagi perkembangan penelitian dimasa yang akan datang.
3. Bagi inspektorat, penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi bagi inspektorat mengenai pengaruh motivasi, integritas dan akuntabilitas terhadap kualitas audit aparat inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam rangka meningkatkan kualitas audit.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, HIPOTESIS

A. KAJIAN TEORI

1. Teori Harapan

Teori harapan memprediksi bahwa karyawan akan mengeluarkan tingkat usaha yang tinggi apabila mereka merasa bahwa ada hubungan yang kuat antara usaha dan kinerja, kinerja dan penghargaan, serta penghargaan dan pemenuhan tujuan-tujuan pribadi. Setiap hubungan ini akan dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Supaya usaha menghasilkan kinerja yang baik, individu harus mempunyai kemampuan yang dibutuhkan untuk bekerja, dan sistem penilaian kinerja yang mengukur kinerja individu tersebut harus dipandang adil dan objektif. Hubungan kinerja – penghargaan akan menjadi kuat bila individu merasa bahwa yang diberi penghargaan adalah kinerja (bukannya senioritas, alasan pribadi, atau kriteria lainnya). Hubungan terakhir dalam teori harapan adalah hubungan penghargaan – tujuan. Motivasi akan tinggi sampai tingkat di mana penghargaan yang diterima seorang individu atas kinerja yang tinggi memenuhi kebutuhan-kebutuhan dominan yang konsisten dengan tujuan-tujuan individual (Robbins, 2008).

Konsisten dengan teori harapan, usaha harus ditingkatkan ketika karyawan melihat bahwa penghargaan diberikan berdasarkan kriteria kinerja. Kinerja karyawan adalah sebuah fungsi (f) dari interaksi kemampuan (A) dan motivasi (M); yaitu $\text{kinerja} = f(A \times M)$. apabila salah satu dari keduanya tidak memadai, kinerja akan dipengaruhi secara negatif. Jadi, selain motivasi kemampuan (berupa

kecerdasan dan keterampilan) seorang individu harus dipertimbangkan ketika menjelaskan dan memprediksi kinerja karyawan dengan akurat. Tetapi, ternyata masih ada satu faktor lagi. Faktor itu adalah peluang untuk bekerja (opportunity to perform, O), sehingga terbentuk fungsi kinerja = $f(A \times M \times O)$. Meskipun seorang individu bersedia dan mampu, mungkin ada rintangan-rintangan yang menghalangi kinerja (Robbins, 2008).

2. Pengawasan Keuangan Daerah

Cahyat (2004) menyatakan bahwa pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan diperlukan untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan pemerintahan berjalan sesuai dengan rencana dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, dalam rangka mewujudkan *good governance* dan *clean government*, pengawasan juga diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta bersih dan bebas dari praktik-praktik KKN. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan tersebut dapat dilakukan melalui pengawasan melekat, pengawasan masyarakat, dan pengawasan fungsional

Pengawasan fungsional merupakan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga/aparat pengawasan yang dibentuk atau ditunjuk khusus untuk melaksanakan fungsi pengawasan secara independen terhadap obyek yang diawasi. Pengawasan fungsional dilakukan oleh lembaga/badan/unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan fungsional melalui audit, investigasi, dan penilaian untuk menjamin agar penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan fungsional dilakukan baik oleh pengawas ekstern pemerintah maupun pengawas intern pemerintah. Pengawasan ekstern pemerintah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sedangkan pengawasan intern pemerintah dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Susmanto, 2008).

Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor PER/05/M.PAN/03/2008, kegiatan utama APIP meliputi audit, review, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya berupa sosialisasi, asistensi dan konsultasi, namun peraturan ini hanya mengatur mengenai Standar Audit APIP. Kegiatan audit yang dapat dilakukan oleh APIP pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam tiga jenis audit berikut ini: pertama, audit atas laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum; kedua, audit kinerja yang bertujuan untuk memberikan simpulan dan rekomendasi atas pengelolaan instansi pemerintah secara ekonomis, efisien dan efektif; dan ketiga, audit dengan tujuan tertentu yaitu audit yang bertujuan untuk memberikan simpulan atas suatu hal yang diaudit. Yang termasuk dalam kategori ini adalah audit investigatif, audit terhadap masalah yang menjadi fokus perhatian pimpinan organisasi dan audit yang bersifat khas.

Menurut Susmanto (2008), APIP melakukan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan negara agar berdaya guna dan berhasil guna untuk membantu manajemen pemerintahan dalam rangka pengendalian terhadap kegiatan unit kerja yang dipimpinnya (fungsi *quality assurance*). Pengawasan

yang dilaksanakan APIP diharapkan dapat memberikan masukan kepada pimpinan penyelenggara pemerintahan mengenai hasil, hambatan, dan penyimpangan yang terjadi atas jalannya pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tanggung jawab para pimpinan penyelenggara pemerintahan tersebut. Lembaga/badan/unit yang ada didalam tubuh pemerintah (pengawas intern pemerintah), yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan fungsional adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yang terdiri dari: pertama, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP); kedua, Inspektorat Jenderal Departemen; ketiga, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) /Kementerian; dan keempat, Lembaga Pengawasan Daerah atau Bawasda Provinsi/Kabupaten/Kota.

Berdasarkan obyek pengawasan, pengawasan terhadap pemerintah daerah dibagi menjadi tiga jenis, yaitu pengawasan terhadap produk hukum dan kebijakan daerah, pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta produk hukum dan kebijakan keuangan daerah. Tugas pokok dan fungsi inspektorat daerah di antaranya yaitu melakukan pengawasan keuangan. Beberapa kewenangan daerah yang menyangkut pengawasan terhadap keuangan dan aset daerah adalah pelaksanaan APBD, penerimaan pendapatan daerah dan Badan Usaha Daerah, pengadaan barang/jasa serta pemeliharaan/penghapusan barang/jasa, penelitian dan penilaian laporan pajak-pajak pribadi, penyelesaian ganti rugi, sertaintarisasi dan penelitian kekayaan pejabat di lingkungan Pemda (Cahyat, 2004).

3. Kualitas Audit

Sampai saat ini belum ada definisi yang pasti mengenai apa dan bagaimana kualitas audit yang baik itu. Tidak mudah untuk menggambarkan dan mengukur kualitas audit secara obyektif dengan beberapa indikator. Hal ini dikarenakan kualitas audit merupakan sebuah konsep yang kompleks dan sulit dipahami, sehingga sering kali terdapat kesalahan dalam menentukan sifat dan kualitasnya. Hal ini terbukti dari banyaknya penelitian yang menggunakan dimensi kualitas audit yang berbeda-beda.

De Angelo (dalam Alim dkk, 2007) mendefinisikan kualitas audit sebagai probabilitas bahwa auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran pada sistem akuntansi *auditee*. Sedangkan Deis dan Groux (dalam Alim dkk, 2007) menjelaskan bahwa probabilitas untuk menemukan pelanggaran tergantung pada kemampuan teknis auditor dan probabilitas melaporkan pelanggaran tergantung pada independensi auditor. Menurut Marxen (1990), sebagaimana dikutip oleh Sososutikno (2003), buruknya kualitas audit disebabkan oleh beberapa perilaku disfungsional, yaitu: *Underreporting of time, premature sign off, altering/replacement of audit procedure*. *Underreporting of time* menyebabkan keputusan personel yang kurang baik, menutupi kebutuhan revisi anggaran, dan menghasilkan *time pressure* untuk audit di masa datang yang tidak diketahui. *Premature sign-off* (PMSO) merupakan suatu keadaan yang menunjukkan auditor menghentikan satu atau beberapa langkah audit yang diperlukan dalam prosedur audit tanpa menggantinya dengan langkah yang lain. Sedangkan *altering/replacing of audit procedure* adalah penggantian prosedur audit yang seharusnya yang telah ditetapkan dalam standar auditing.

Dalam sektor publik, *Government Accountability Office* (GAO) mendefinisikan kualitas audit sebagai ketaatan terhadap standar profesi dan ikatan kontrak selama melaksanakan audit (Lowenshon *et al*, 2005). Standar audit menjadi bimbingan dan ukuran kualitas kinerja auditor (Messier *et al*, 2005). Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor PER/05/M.PAN/03/2008, pengukuran kualitas audit atas laporan keuangan, khususnya yang dilakukan oleh APIP, wajib menggunakan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Dalam lampiran 3 (paragraf 17) SPKN disebutkan bahwa:

“Besarnya manfaat yang diperoleh dari pekerjaan pemeriksaan tidak terletak pada temuan pemeriksaan yang dilaporkan atau rekomendasi yang dibuat, tetapi terletak pada efektivitas penyelesaian yang ditempuh oleh entitas yang diperiksa. Manajemen entitas yang diperiksa bertanggung jawab untuk menindaklanjuti rekomendasi serta menciptakan dan memelihara suatu proses dan sistem informasi untuk memantau status tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksa dimaksud. Jika manajemen tidak memiliki cara semacam itu, pemeriksa wajib merekomendasikan agar manajemen memantau status tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksa. Perhatian secara terus-menerus terhadap temuan pemeriksaan yang material beserta rekomendasinya dapat membantu pemeriksa untuk menjamin terwujudnya manfaat pemeriksaan yang dilakukan”

Audit yang berkualitas adalah audit yang dapat ditindaklanjuti oleh *auditee*. Kualitas ini harus dibangun sejak awal pelaksanaan audit hingga pelaporan dan pemberian rekomendasi. Dengan demikian, indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas audit antara lain kualitas proses, apakah audit dilakukan dengan cermat, sesuai prosedur, sambil terus mempertahankan sikap skeptis. Kualitas audit adalah sikap auditor dalam melaksanakan tugasnya yang tercermin dalam hasil pemeriksaannya yang dapat diandalkan sesuai standar yang berlaku. Hasil audit pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dikatakan

berkualitas jika hasil pemeriksaan (audit) dapat meningkatkan bobot pertanggungjawaban, serta memberikan informasi pembuktian ada tidaknya penyimpangan dari standar-standar audit dari sektor pemerintahan.

Menurut Pernyataaan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (2007:113), indikator kualitas audit adalah sebagai berikut :

- a) Tepat waktu, agar suatu informasi bermanfaat secara maksimal, maka laporan hasil pemeriksaan harus tepat waktu. Laporan yang dibuat dengan hati-hati tetapi terlambat disampaikan, nilainya menjadi kurang bagi pengguna laporan hasil pemeriksaan. Oleh karena itu, pemeriksa harus semestinya dan melakukan pemeriksaan dengan dasar pemikiran tertentu.
- b) *Lengkap*, Agar menjadi lengkap, laporan hasil pemeriksaan harus memuat semua informasi dari bukti yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan pemeriksaan, memberikan pemahaman yang benar dan memadai atas hal yang dilaporkan, dan memenuhi persyaratan isi laporan hasil pemeriksaan. Hal ini juga berarti bahwa laporan hasil pemeriksaan harus memasukkan secara memadai.
- c) Akurat, Akurat berarti bukti yang disajikan benar dan temuan itu disajikan dengan tepat. Perlunya keakuratan didasarkan atas kebutuhan untuk memberikan keyakinan kepada pengguna laporan hasil pemeriksaan bahwa apa yang dilaporkan memiliki kreadibilitas dan dapat diandalkan.

- d) Objektif, Obyektifitas berarti penyajian seluruh laporan harus seimbang dalam isi dan nada. Kreadibilitas suatu laporan ditentukan oleh penyajian bukti yang tidak memihak, sehingga pengguna laporan hasil pemeriksaan dapat diyakinkan oleh fakta yang disajikan.
- e) Meyakinkan, Agar meyakinkan, maka laporan harus dapat menjawab tujuan pemeriksaan, menyajikan temuan, simpulan, dan rekomendasi yang logis. Informasi yang disajikan harus cukup meyakinkan pengguna laporan untuk mengakui validasi temuan tersebut dan manfaat penerapan rekomendasi. Laporan yang disusun dengan cara ini dapat membantu pejabat yang bertanggung jawab untuk memusatkan perhatiannya atas hal yang memerlukan hal perhatian itu, dan dapat membantu untuk melakukan perbaikan sesuai rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.
- f) Jelas, Laporan harus mudah dibaca dan mudah dipahami. Laporan harus ditulis dengan bahasa yang jelas dan sesederhana mungkin. Penggunaan bahasa yang lugas dan tidak teknis sangat penting untuk menyederhanakan penyajian. Jika digunakan istilah teknis, singkatan, dan akronim yang tidak begitu dikenal, maka hal itu harus didefinisikan dengan jelas.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dilihat bahwa audit berfungsi sebagai proses untuk mengurangi ketidakselarasan informasi sehingga auditor harus menghasilkan audit yang berkualitas. Menurut Simamora (2002), ada 8 prinsip yang harus dipatuhi oleh auditor untuk mendapatkan hasil audit yang berkualitas, yaitu:

- a) Tanggung jawab profesi, setiap anggota harus menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya.
- b) Kepentingan publik, setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa menghormati kepercayaan publik dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme.
- c) Integritas, setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin.
- d) Objektivitas, setiap anggota harus menjaga objektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya.
- e) Kompetensi dan kehati-hatian profesional. Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan hati-hati, kompetensi dan ketekunan serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional.
- f) Kerahasiaan, setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesionalnya dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan.
- g) Perilaku profesional, setiap anggota harus berperilaku yang konsisten sesuai dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi.
- h) Standar teknis, setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan.

4. Motivasi

Menurut (Pusdiklatwas BPKP, 2008) motivasi merupakan daya penggerak dari dalam individu atau auditor untuk melakukan aktivitas-aktivitas audit yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Motivasi dipandang dari segi proses, berarti motivasi dapat dirangsang oleh faktor luar, untuk menumbuhkan motivasi dalam diri yang melalui proses rangsangan sehingga dapat mencapai tujuan yang dikehendaki. Motivasi dipandang dari segi tujuan, berarti motivasi merupakan sasaran stimulus yang akan dicapai. Jika seorang mempunyai keinginan untuk belajar suatu hal, maka dia akan termotivasi untuk mencapainya.

Mc.Donald (dalam Sardiman 2007 : 73), menyatakan bahwa motivasi sebagai perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya "*felling*" dan di dahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan. Dari penjelasan diatas terdapat 3 elemen penting yang terkandung dalam teori tersebut : bahwa manusia mengawali terjadinya perubahan energi dari setiap individu manusia (walaupun motivasi itu muncul dari dalam diri manusia), penampakkannya akan menyangkut kegiatan fisik manusia; motivasi di tandai dengan munculnya rasa "*felling*" yang relevan dengan persoalan-persoalan kejiwaan, efeksi dan emosi, serta dapat menentukan tingkah laku manusia; motivasi akan dirangsang karena adanya tujuan dan tujuan ini akan menyangkut soal kebutuhan.

Teori lain yang menjelaskan tentang motivasi adalah Goleman (2001) yang menyatakan bahwa dengan adanya motivasi seseorang akan memiliki semangat juang yang tinggi untuk meraih tujuan dan memenuhi standar yang ada atau dengan kata lain, motivasi akan mendorong seseorang termasuk auditor, untuk berprestasi dan berkomitmen terhadap kelompok serta memiliki inisiatif dan

optimisme yang tinggi. Dengan demikian, tingginya motivasi dari auditor akan dapat meningkatkan kualitas hasil audit, karena dengan adanya motivasi yang tinggi auditor akan terdorong untuk melakukan tugasnya dengan sebaik-sebaiknya sehingga hasil auditnya akan lebih berkualitas. Menurut Suwandi (2005), dalam konteks organisasi, motivasi adalah pepaduan antara kebutuhan organisasi dengan kebutuhan personil. Hal ini akan mencegah terjadinya ketegangan / konflik sehingga akan membawa pada pencapaian tujuan organisasi secara efektif. Sedangkan Terry dalam Efendy (2010) mendefinisikan motivasi sebagai keinginan di dalam seorang individu yang mendorong ia untuk bertindak.

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa motivasi merupakan dorongan dari dalam diri seseorang untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan adanya motivasi yang tinggi, maka auditor akan terdorong untuk lebih bekerja keras untuk mencapai tujuannya dalam menghasilkan hasil audit yang berkualitas.

5. Integritas

Pusdiklatwas BPKP (2008) menjelaskan bahwa Integritas seorang auditor sangat diperlukan agar auditor dapat bertindak jujur dan tegas dalam melaksanakan audit. Dalam hal ini prinsip yang mengharuskan auditor memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur kejujuran, bijaksana, dan bertanggung jawab untuk membangun kepercayaan memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang andal. Salim (2003) juga menjelaskan bahwa integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan bagi anggota dalam menguji semua keputusannya. Integritas juga dapat dijelaskan bahwa

seseorang menjalankan tugas dan pekerjaan dengan selalu memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.

Integritas adalah satu kata dengan perbuatan, dia berkata jujur dan tentu saja tidak akan bohong. Dalam hal ini Covey (2006) membedakan antara kejujuran dan integritas “*honesty is telling the truth, in other word, conforming our words reality-integrity is conforming to our words, in other words, keeping promises and ful-filling expectations.*” Kejujuran berarti menyampaikan kebenaran, ucapannya sesuai dengan kenyataan. Sedang integritas membuktikan tindakannya sesuai dengan ucapannya. Orang yang memiliki integritas dan kejujuran adalah orang yang merdeka. Mereka menunjukkan keautentikan dirinya sebagai orang yang tanggung jawab dan berdedikasi.

Integritas dan kepemimpinan sangat erat satu sama lain. Covey (2006) menyebutkan *integrity is doing what we say will do*. Seorang pemimpin harus dapat bertindak secara konsisten antara kata dan perbuatan.

Integritas yaitu apa yang kita lakukan sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Karena orang-orang yang kita pimpin akan melihat sampai sejauhmana kita melaksanakan apa yang kita ucapkan, sehingga mereka akan mengikuti apa yang kita perintahkan.

Selanjutnya, Wibowo (2006) menyatakan bahwa integritas auditor menguatkan kepercayaan dan karenanya menjadi dasar bagi pengendalian atas judgement mereka.

Untuk mewujudkannya memerlukan kerja keras, dengan memiliki integritas dalam kepemimpinan, seorang pemimpin harus menggabungkan seluruh

aspek yang ada dalam dirinya dan menjadi satu kesatuan yang saling mendukung satu sama lainnya. Integritas adalah satu kata dengan perbuatan, dia berkata jujur dan tentu saja tidak akan bohong.

6. Akuntabilitas

Pusdiklatwas BPKP (2008) menjelaskan bahwa akuntabilitas dapat diartikan sebagai perwujudan pertanggungjawaban seseorang atau unit organisasi, dalam mengelola sumber daya yang telah diberikan dan dikuasai dalam rangka pencapaian tujuan melalui suatu media berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik. Sumber daya dalam hal ini merupakan sarana pendukung yang diberikan kepada seseorang atau unit organisasi dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas yang telah dibebankan kepadanya.

Tetclock (1984) dalam Salsabila dan Hepi (2011) mendefinisikan akuntabilitas sebagai bentuk dorongan psikologi yang membuat seseorang berusaha mempertanggungjawabkan semua tindakan dan keputusan yang diambil kepada lingkungannya. Tan dan Alison (1999) dalam Salsabila dan Hepi (2011) melihat ada tiga indikator yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas individu. Pertama, seberapa besar motivasi mereka untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Motivasi secara umum adalah keadaan dalam diri seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan. Menurut Libby dan Luft (1993), dalam kaitannya dengan akuntabilitas seseorang, orang dengan akuntabilitas tinggi juga memiliki motivasi tinggi dalam mengerjakan sesuatu.

Kedua, seberapa besar usaha (daya pikir) yang diberikan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Orang dengan akuntabilitas tinggi mencurahkan usaha (daya pikir) yang lebih besar dibanding orang dengan akuntabilitas rendah ketika menyelesaikan pekerjaan (Cloyd, 1997) dan ketiga, seberapa yakin mereka bahwa pekerjaan mereka akan diperiksa oleh atasan. Keyakinan bahwa sebuah pekerjaan akan diperiksa atau dinilai orang lain dapat meningkatkan keinginan dan usaha seseorang untuk menghasilkan pekerjaan yang lebih berkualitas.

Ada banyak penelitian psikologi sosial yang membuktikan adanya hubungan dan pengaruh akuntabilitas seseorang terhadap kualitas pekerjaan. Messier dan Quilliam (1992) mengungkapkan bahwa akuntabilitas yang dimiliki auditor dapat meningkatkan proses kognitif auditor dalam mengambil keputusan. Tetlock dan Kim (1987) juga mengkaji tentang permasalahan akuntabilitas auditor dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan. Penelitian ini dilakukan dengan membagi subjek penelitian menjadi tiga kelompok: pertama, kelompok yang diberikan instruksi bahwa pekerjaan mereka tidak akan diperiksa oleh atasan (no accountability); kedua, kelompok yang diberikan instruksi di awal (sebelum melaksanakan pekerjaan) bahwa pekerjaan mereka akan diperiksa oleh atasan (preexposure accountability); ketiga, kelompok yang diberikan instruksi bahwa pekerjaan mereka akan diperiksa oleh atasan, tetapi instruksi ini baru disampaikan setelah mereka menyelesaikan pekerjaan (postexposure accountability). Dari hasil penelitian ini terbukti bahwa subjek penelitian dalam kelompok preexposure accountability menghasilkan pekerjaan yang lebih berkualitas dibandingkan dengan kelompok lainnya. Mereka melakukan proses kognitif yang

lebih lengkap, respon yang lebih tepat dan melaporkan keputusan yang lebih dapat dipercaya dan realistis.

Dengan demikian, akuntabilitas sangat diperlukan agar auditor dapat bekerja secara lebih bertanggung jawab sehingga akan menghasilkan hasil audit yang berkualitas dan dapat dipercaya oleh publik.

B. PENELITIAN TERDAHULU

Beberapa penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh peneliti lainnya untuk mengetahui pengaruh motivasi, integritas dan akuntabilitas terhadap kualitas audit aparat inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah. Berikut ini adalah beberapa penelitian yang relevan, diantaranya:

Tabel 1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

Nama peneliti dan metode	Variabel independen (X)	Variabel Dependen (Y)	Hasil penelitian
Ardini (2010)	Kompetensi, independensi, akuntabilitas dan motivasi	Kualitas audit aparat inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah	Kompetensi, independensi, akuntabilitas dan motivasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit aparat inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah
Efendy (2010)	Kompetensi, Independensi, dan Motivasi	Kualitas Audit Aparat Inspektorat Dalam pengawasan keuangan daerah	Kompetensi dan motivasi berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas audit aparat inspektorat, independensi tidak berpengaruh positif terhadap kualitas audit aparat inspektorat
Salsabila dan Hepi (2011)	Akuntabilitas, pengetahuan auditor dan <i>gender</i>	Kualitas audit aparat inspektorat	Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit aparat inspektorat Pengetahuan audit

			berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit aparat inspektorat Gender tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit aparat inspektorat
Ramadhanis (2012)	Kompetensi, independen dan motivasi	Kualitas audit aparat inspektorat	Kompetensi, independensi dan motivasi berpengaruh positif terhadap kualitas audit aparat inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah
Badjuri (2012)	Pengalaman kerja, independensi, obyektifitas, integritas dan kompetensi	Kualitas audit aparat inspektorat	Pengalaman kerja, Independensi dan obyektifitas tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Integritas dan kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit
Wirasuasti (2014)	Kompetensi, idependensi, motivasi	Kualitas Audit aparat inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah	Kompetensi, independensi dan motivasi berpengaruh positif terhadap kualitas audit aparat inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah

C. HUBUNGAN ANTAR VARIABEL

1. Pengaruh Motivasi terhadap Kualitas hasil audit aparat inspektorat

Sebagaimana dikatakan oleh Goleman (2001), hanya motivasi yang akan membuat seseorang mempunyai semangat juang yang tinggi untuk meraih tujuan dan memenuhi standar yang ada. Dengan kata lain, motivasi akan mendorong seseorang, termasuk auditor, untuk berprestasi, komitmen terhadap kelompok

serta memiliki inisiatif dan optimisme yang tinggi. Respon atau tindak lanjut yang tidak tepat terhadap laporan audit dan rekomendasi yang dihasilkan akan dapat menurunkan motivasi aparat untuk menjaga kualitas audit.

Dengan adanya motivasi yang tinggi, seseorang akan terdorong untuk melakukan pekerjaannya dengan sebaik mungkin agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dimana dalam hal ini tujuan seorang auditor adalah untuk auditor maka akan semakin baik pula kualitas hasil audit yang dihasilkan.

Hal diatas sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wirasusati (2014) yang menemukan bahwa motivasi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Ramadhanis (2012) yang juga menemukan bahwa motivasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

2.Pengaruh Integritas terhadap Kualitas hasil audit aparat inspektorat

Integritas berarti bertindak konsisten sesuai dengan nilai-nilai dan kebijakan organisasi serta kode etik profesi. Auditor yang tinggi integritasnya adalah yang dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja atau yang disebabkan oleh kelalaian manusia (*human error*) dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak dapat menerima kecurangan atau peniadaan prinsip. Auditor dituntut untuk memiliki kepribadian yang dilandasi oleh sikap jujur, berani, bijaksana dan bertanggung jawab untuk membangun kepercayaan guna memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang handal (Pusdiklatwas BPKP, 2008).

Jika seorang auditor memiliki integritas yang tinggi maka tingkat kecurangan dalam proses audit dapat diminimalisir, karena auditor memiliki sikap yang jujur berani, bijaksana dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya sehingga hasil audit yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipercaya. Dengan demikian, semakin tinggi integritas auditor dalam penugasan audit maka akan semakin baik pula kualitas hasil audit yang dihasilkan. Hal di atas didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Badjuri (2012) yang menemukan bahwa integritas berpengaruh terhadap kualitas audit.

3. Pengaruh Akuntabilitas terhadap kualitas hasil audit aparat inspektorat

Pusdiklatwas BPKP (2008) menjelaskan bahwa akuntabilitas dapat diartikan sebagai perwujudan pertanggungjawaban seseorang atau unit organisasi, dalam mengelola sumber daya yang telah diberikan dan dikuasai dalam rangka pencapaian tujuan melalui suatu media berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik. Sumber daya dalam hal ini merupakan sarana pendukung yang diberikan kepada seseorang atau unit organisasi dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas yang telah dibebankan kepadanya.

Tetclock (1984) dalam Salsabila dan Hepi (2011) mendefinisikan akuntabilitas sebagai bentuk dorongan psikologi yang membuat seseorang berusaha mempertanggungjawabkan semua tindakan dan keputusan yang diambil kepada lingkungannya. Dengan adanya akuntabilitas yang tinggi auditor akan terdorong untuk mencurahkan segala daya pikirnya untuk mencapai tujuannya dalam menghasilkan hasil audit yang berkualitas. Dengan demikian, semakin tinggi

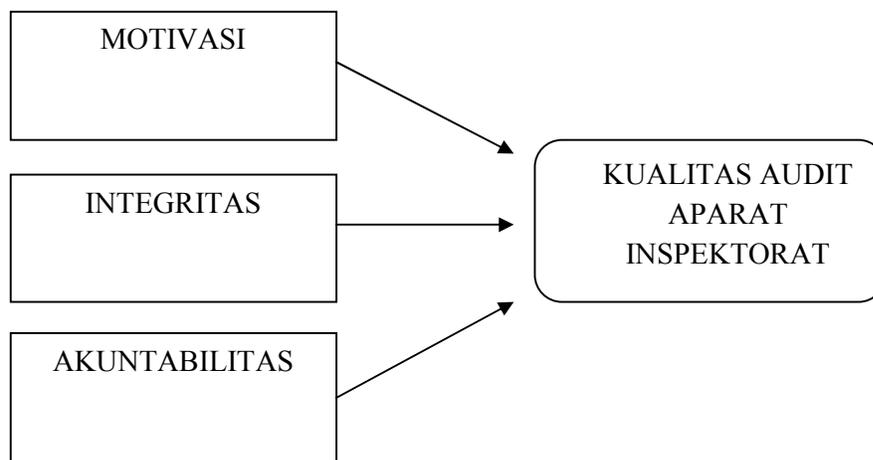
akuntabilitas auditor, maka akan semakin tinggi pula kualitas hasil audit yang dihasilkan, begitu juga sebaliknya.

Hal diatas sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ardini (2010) yang menemukan bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit aparat inspektorat. Begitu pula dengan hasil penelitian yang dilakukan Salsabila dan Hepi (2011) yang juga menemukan hasil yang sama.

D. KERANGKA KONSEPTUAL

Berikut ini disajikan rerangka pikir penelitian secara ilustratif mengenaipengaruh motivasi, integritas, dan akuntabilitas terhadap kualitas hasil audit.

Gambar 1: Kerangka Konseptual



E. HIPOTESIS

Berdasarkan kerangka konseptual diatas maka hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Motivasi berpengaruh positif terhadap kualitas audit aparat inspektorat.

- H2: Integritas berpengaruh positif terhadap kualitas audit aparat inspektorat.
- H3: Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas audit aparat inspektorat.

BAB V

SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, maka hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Motivasi berpengaruh signifikan positif terhadap Kualitas audit aparat Inspektorat Kota Padang, Padang Panjang dan Bukittinggi, dimana motivasi menunjukkan kegigihan, keuletan, dan konsistensi pada auditor dalam melaksanakan pekerjaannya demi mencapai tujuan hasil audit yang berkualitas.
2. Integritas berpengaruh signifikan positif terhadap Kualitas audit aparat Inspektorat Kota Padang, Padang Panjang dan Bukittinggi, dimana dengan integritas yang dimiliki oleh auditor, hasil pekerjaan yang telah dilakukannya dapat dipercaya dan dapat dipertanggung jawabkan.
3. Akuntabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap Kualitas audit aparat Inspektorat Kota Padang, Padang Panjang dan Bukittinggi, dimana rekomendasi yang diberikan oleh auditor dapat dipertanggungjawabkan dengan kemahiran jabatan yang dimilikinya.

B. Keterbatasan

Meskipun peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian sedemikian rupa, namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yaitu :

1. Dalam penelitian ini, peneliti mengacu kepada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) tahun 2007 yang dikeluarkan oleh BPK-RI untuk dapat melihat bagaimana Inspektorat melakukan tugas pengawasannya. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan untuk memakai Standar APIP yang wajib oleh digunakan oleh Inspektorat.
2. Diantara variabel yang diteliti pada penelitian ini masih terdapat beberapa item pada kuesioner dimana TCR yang diperoleh masih pada kategori cukup atau nilai TCR masih rendah. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk lebih menyempurnakan lagi hasil penelitian ini

C. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas, maka peneliti menyarankan bahwa:

1. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dilihat bahwa pengaruh yang diberikan tiga variabel bebas yaitu motivasi, integritas dan akuntabilitas terhadap kualitas audit aparat inspektorat baik. Sebaiknya aparat inspektorat dalam hal ini auditor meningkatkan indikator diatas sehingga dapat meningkatkan kepercayaan terhadap hasil audit aparat Inspektorat.
2. Penelitian ini masih terbatas pada motivasi, integritas dan akuntabilitas. Untuk penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi kualitas audit aparat inspektorat.